

BAB IV

DAMPAK GASTRODIPLOMACY INDONESIA TERHADAP AUSTRALIA

Keberhasilan beberapa negara berkembang meningkatkan *nation branding* dan perekonomian dengan dukungan gastrodiploomasinya merupakan sebuah *wake up call* bagi Indonesia untuk segera membangun strategi serupa. Kemlu perlu segera menyusun sebuah *grand design* diplomasi kuliner Indonesia sebagai bagian dari *soft power diplomacy* Indonesia. Hal ini antara lain bertujuan agar masakan Indonesia lebih dikenal luas oleh masyarakat internasional dan kuliner Indonesia dapat menjadi bagian penting dari khasanah kuliner global. Promosi kuliner melalui gastrodiploماسi tidak saja akan mewakili tampilan budaya, namun juga akan membawa manfaat bagi kepentingan ekonomi Indonesia. Perdagangan secara tradisional selalu menjadi isu penting dalam diplomasi. Secara ideal kebijakan perdagangan dan kebijakan luar negeri saling mendukung (Barston, 2014). Dengan premis tersebut Kemlu nampaknya mulai memberi perhatian pada gastrodiploماسi. Perhatian lebih besar kepada kuliner nasional mulai tampak dalam FGD Kemlu tentang promosi kuliner Indonesia di luar negeri di 2011. Muncul kesadaran penguatan peran kuliner Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan *political recognition* dan komitmen dari pemerintah dan masyarakat, upaya peningkatan standar dan kreativitas kuliner Indonesia agar dapat bersaing di luar negeri, dan multiplier effect terhadap perekonomian nasional (Negeri, Kuliner Sebagai Bagian dari Diplomasi Ekonomi Indonesia, 2011). FGD tersebut direncanakan bukan menjadi *one-stop event*, tetapi diharapkan akan diikuti dengan kegiatan yang lebih konkrit dan berkesinambungan di masa mendatang,

baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri maupun oleh instansi pemerintah atau lembaga lainnya. Dari hasil FGD tersebut dapat memberikan masukan berupa bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan sebagai bentuk dari strategi gastrodipomasi.

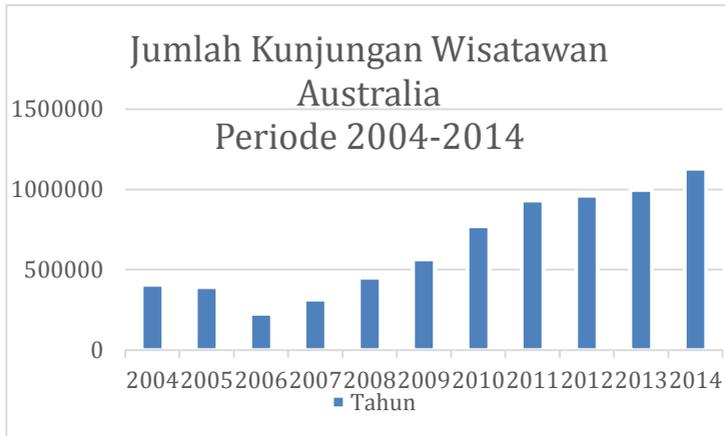
Setelah diuraikan di atas bentuk-bentuk gastrodipomasi Indonesia terhadap Australia berupa mengadakan festival makanan Indonesia, restoran Indonesia dan beberapa produk makanan yang berada di Australia selanjutnya akan penulis akan membahas terkait pengaruh atau dampak dari kedua acara tersebut pada hubungan Indonesia dan Australia.

A. Meningkatnya Jumlah Wisatawan

Festival Indonesia menjadi ikon kota di Australia. *“This is fantastic! I never saw huge people coming to enjoy food and music at Embassy before,”* demikian tutur Melissa yang seorang pengunjung bertutur ketika Festival Indonesia Warga Kota Canberra sejak pagi hingga sore hari, tidak berhenti datang berbondong-bondong menuju Gedung KBRI Canberra, menghadiri Festival Indonesia. Acara ini ditujukan untuk mempromosikan kuliner Indonesia di Australia merupakan salah satu program sosial budaya utama KBRI Canberra. Dan pada hari Sabtu mendatang, tanggal 10 Oktober 2015, bertempat di halaman KBRI Canberra, akan dilangsungkan Festival Indonesia 2015 besar-besaran, yang menyajikan tidak hanya makanan dan minuman khas Nusantara, melainkan juga seni dan budaya tradisional dan kontemporer Indonesia (Kementerian Luar Negeri, 2015).

Hasil dari kegiatan ini berdasarkan data kementerian luar negeri pada Januari hingga Agustus 2015, sebanyak 740.000 wisatawan Australia berkunjung ke Indonesia. Angka ini 40 ribu lebih tinggi dari periode yang sama pada 2014 dan 120 ribu lebih banyak dari 2013.” “Dengan

berbagai promosi kekayaan seni, budaya dan wisata Indonesia tidak hanya di Canberra, tetapi di kota-kota lain seperti Adelaide, Brisbane, Darwin, Melbourne, Perth dan Sydney, kami optimis jumlah wisatawan Australia ke Indonesia tahun 2015 dapat melebihi 1,1 juta pengunjung (Kemenlu.go.id, 2015).



Gambar 28. Jumlah Wisatawan Australia Tahun 2004-2014

Sumber. BPS

Berdasarkan grafik di atas terlihat kenaikan yang signifikan jumlah wisatawan mancanegara yang berasal dari Australia. Hal ini merupakan dampak dari gastrodiplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Australia dalam bentuk festival Indonesia dan festival makanan Indonesia.

Selain peningkatan jumlah wisatawan dampak dari gastrodiplomasi Indonesia terhadap Australia adalah semakin dikenalnya Indonesia dengan branding wonderful indonesia oleh masyarakat Australia. Sehingga hal

tersebutlah sesungguhnya yang menjadi daya tarik wisatawan asal Australia untuk berkunjung ke Indonesia.

Penurunan jumlah wisatawan yang terjadi pada tahun 2006 dikarenakan telah terjadinya bom di Bali atau yang dikenal sebagai Bom Bali II yang sebelumnya Bom Bali I. Tragedi Bom Bali I dan Bom Bali II menimbulkan kekhawatiran keamanan bagi wisatawan, karena Bali juga merupakan sebuah icon pariwisata Indonesia. Namun penurunan jumlah wisatawan akibat Bom Bali II tidak separah penurunan yang terjadi pada Bom Bali I (Andriansyah, 2008).

Pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, peran jaringan diaspora Indonesia diaktifkan dengan membentuk *Indonesia Culinary Task Force*. Ini merupakan platform untuk promosi, peningkatan dan membawa masakan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi diseluruh dunia dengan cara menunjukkan masakan tradisional dan modern Indonesia baik melalui catering pada acara kuliner, memberikan kelas memasak, lokakarya dan demo masak, acara pendidikan dan konsultasi masakan Indonesia. Tetapi kegiatan ini tampak mengendur setelah era pemerintahan presiden SBY berakhir (Pujayanti, 2017).

Strategi diplomasi dengan pendekatan kuliner dan budaya sangat efektif dan dapat menekan biaya, sehingga dapat mendapatkan hasil yang maksimal dengan beban biaya yang minim. Terlebih dengan pendekatan yang dibangun melalui gastrodiplomasi dapat meredakan hubungan yang “panas dingin” antara Indonesia dengan Australia. Hal tersebut dapat terwujud karena pendekatan gastrodiplomasi merupakan pendekatan meja makan dan perut dimana setiap orang akan terbawa suasana yang

santai dan nikmat dengan sugguhan sajian kuliner nusantara yang terkenal lezatnya.

B. Program Pendidikan, Penelitian dan Pertukaran Pelajar

Program Pendidikan diantara Indonesia dan Australia, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini diakibatkan bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian adalah komponen penting bagi kedua negara, bahkan sampai dengan bulan Agustus 2014, mahasiswa dan pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi di Australia menyentuh angka 17.712 orang (Australia Plus, 2014).

Semenjak 2003, kedua negara memiliki begitu banyak program kerjasama pertukaran yang melibatkan para pemuda dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari hubungan baik antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan para Perdana Menteri Australia seperti Kevin Rudd, Julia Gillard dan Tony Abbot. Berbagai program itu terdiri dari (Australia Embassy in Indonesia, 2017):

1. Program Pertukaran Tokoh Muslim Australia-Indonesia (MEP).



Program ini telah ditandatangani sejak 2003, namun baru mulai untuk efektif pada 2004 silam. Program ini diinisiasi oleh Kedutaan Besar Australia (Kedubes Australia) dengan salah satu universitas swasta, yakni Universitas Paramadina Jakarta.

Tujuan utamanya, jelas untuk menyatukan keberlanjutan antara para pemimpin muda yang berasal dari berbagai komunitas muslim di kedua negara. Program ini dianggap berhasil dalam membangun hubungan tidak hanya dikalangan pemuda muslim, namun dengan berbagai kelompok agama, etnis dan kelompok lainnya di kedua negara.

Masing-masing peserta diberikan kesempatan mengunjungi masing-masing negara, untuk kemudian mempelajari berbagai keberagaman, kebudayaan, serta berbagai tradisi yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar pembelajaran di negara masing-masing.

2. Program Pertukaran Pemuda Australia Indonesia (AIYEP)



Merupakan salah satu program yang paling diminati oleh para pemuda Indonesia, yakni AIYEP. Setiap tahunnya, total ada 18 pemuda berusia 21-25 tahun mendapatkan kesempatan berkunjung ke Australia selama dua bulan.

Program ini diinisiasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) dan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia.

Melalui program ini, para pemuda mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan kebudayaan dan bagaimana gaya hidup pemuda kedua negara. Alumni AIYEP kemudian akan diwajibkan untuk membentuk kelompok yang dapat bertindak dinamis dan mampu berkarya dalam bidang pekerjaan yang mendukung hubungan bilateral kedua negara.

3. Program Kemitraan Sekolah Australia-Indonesia BRIDGE

Tepat pada 25 Februari 2018 lalu, 32 dari 16 sekolah di seluruh Indonesia mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Australia dan belajar secara langsung bagaimana sistem sekolah yang diselenggarakan di masing-masing negara.

Tahun ini menandai 10 tahun peringatan program yang mendukung kemitraan antara lembaga pendidikan di Australia dan Asia. Di Indonesia, sudah ada 180 sekolah di 18 provinsi yang telah menjadi bagian dari program ini (President News, 2018).

Diluncurkan tahun 2008, Program Kemitraan Sekolah Australia-Indonesia BRIDGE merupakan gagasan Australia-Indonesia Institute dan Asia Education Foundation (AEF). Hingga kini, program BRIDGE telah menjalin kerja sama dengan 164 sekolah Australia-Indonesia dan secara langsung melibatkan lebih dari 655 guru Australia dan Indonesia.

Dengan menciptakan dan mendukung kerja sama antar sekolah, BRIDGE membangun hubungan antara guru dan pelajar Australia dan Indonesia, meningkatkan kapasitas guru, pemahaman pertukaran

budaya, kompetensi global, dan keahlian penggunaan teknologi baru untuk kolaborasi berkelanjutan.

Perpaduan model pembelajaran profesional ini mendukung komunitas sekolah di Indonesia dan Australia untuk membangun kemitraan sekolah internasional.

Tujuan Program BRIDGE Australia-Indonesia adalah untuk:

- a. Menciptakan dan mendukung kemitraan sekolah-ke-sekolah;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian lintas budaya semua peserta;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian Teknologi Informasi dan Telekomunikasi semua peserta;
- d. Membangun pengetahuan dan keahlian profesional, termasuk strategi praktik mengajar yang efektif, di antara para pengajar yang menjadi peserta;
- e. Menyediakan dukungan khusus untuk membangun Program Edukasi Baru untuk sekolah-sekolah di Indonesia.

C. Gastrodiplomacy Sebagai Peredam Konflik Kedua Negara

Ibarat pasangan kekasih, selalu saja ada alasan bagi Indonesia dan Australia untuk selalu bertengkar, tetapi kemudian rujuk. Selama Presiden SBY memimpin saja, terdapat berbagai permasalahan dan konflik yang melibatkan kedua negara, namun kemudian berhasil diredam, salah satunya dengan cara Gastrodiplomacy ini.

Hubungan kedua negara pernah menegang akibat kasus Schapelle Corby 2004 silam. Schapelle adalah salah seorang pengedar obat-obatan terlarang, yang dihukum 20

tahun penjara, akibat diketemukan narkoba di dalam tasnya, dan dihukum selama 20 tahun penjara, di Bali. Berbagai cara dilakukan tidak hanya oleh pemerintah Australia, namun juga oleh masyarakat Australia sendiri, agar hukuman terhadap Schapelle dapat diringankan, termasuk dengan melakukan aksi demo di Indonesia dan Australia (Firman, 2017).

Pada 2006, kembali terjadi Insiden krisis diplomatik terkait Papua Barat. Bill Leak, dalam tulisannya yang dimuat oleh *The Australian*, melakukan sindiran kepada SBY saat itu yang memprotes pemberian visa bagi pengungsi yang menyeberang dari Merauke dan juga terkait situasi Papua Barat.

Kejadian pada tahun 2006 ini dikenal sebagai krisis pengungsi Papua Barat. Merespons tindakan pemberian visa terhadap pengungsi Papua Barat, Duta Besar Indonesia untuk Australia ditarik pulang. Menurut laporan *The Age*, sekitar 42 orang diberi visa perlindungan setelah sebelumnya dianiaya di Merauke terkait aspirasi kemerdekaan.

Pada periode 2007-2013 bahkan terjadi kasus besar antara kedua negara yang diungkapkan oleh Badan Intelijen Negara (BIN), yakni penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap petinggi-petinggi negara, termasuk Presiden RI, SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Imbasnya, kedua negara sama-sama melakukan gerakan penarikan Duta Besar dari masing-masing negara, dan bahkan militer Indonesia memutuskan untuk berhenti bekerjasama dengan pasukan militer Australia. Hal ini diperparah dengan munculnya sikap penolakan permintaan maaf dari Perdana Menteri Abbott saat itu.

Akibat konflik yang berkepanjangan tersebut, beruntunglah kemudian hadir diplomasi gaya baru bagi kedua negara, yakni gastrodipomasi. Masyarakat

Australia yang selama ini identik mengenal Indonesia akibat kasus hukuman mati, impor sapi, penyadapan, hingga pemutusan hubungan militer, mulai melupakan jejak-jejak itu. Gastrodiplomasi hadir untuk merendat berbagai konflik hati dan pikiran caranya dengan melalui perut. Berbagai cara gastrodiplomasi pun, ditempuh oleh pemerintah, yang mengakibatkan membaiknya pandangan masyarakat Australia terhadap Indonesia.

Hal ini dibuktikan oleh survei yang dilakukan oleh Lowy Institute Poll pada 2013 silam (Renaldi, 2018). Survei yang melibatkan 1200 responden ini bertanya “*Apakah menurut mereka Australia harus menjaga hubungan baik dengan Indonesia?*”, 61 persen menjawab perlu, menunjukkan bagaimana pandangan masyarakat Australia terhadap Indonesia yang sungguh baik.